



Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai *Tax Evasion*

Merry Triani^{1*}, Melati Pramudita Lestari², Henri Prastetyo³

¹²³Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

*Email: merrytriani01@yahoo.com¹, pramumelati@gmail.com², henriprastetyo@gmail.com³

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :

2024-10-09

Diperbaiki :

2024-12-10

Disetujui :

2024-12-12

Kata Kunci:

Penggelapan Pajak;
Keadilan; Sistem
Perpajakan; Persepsi
Mahasiswa; Kepatuhan
Pajak

ABSTRAK

Tingginya kasus tax evasion di Indonesia yang menghambat penerimaan negara. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, serta diskriminasi pada pandangan mahasiswa perihal tax evasion (penggelapan pajak). Metode penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data melewati kuesioner. Sampel penelitian yaitu mahasiswa semester 6 serta 8 prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Analisis data memakai regresi linear berganda. Capaian penelitian menampilkan bahwa diskriminasi serta keadilan tidak memberi dampak signifikan pada pandangan mahasiswa perihal penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan memberi dampak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan diskriminasi tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan. Kesimpulannya, persepsi mahasiswa tentang etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap sistem perpajakan, tetapi tidak dipengaruhi oleh rasa keadilan maupun diskriminasi. Temuan ini relevan untuk mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

ABSTRACT

The high rate of tax evasion in Indonesia, which hinders state revenue, is the background of this study. This research aims to determine the influence of fairness, the taxation system, and discrimination on students' views regarding tax evasion. The research method employs a quantitative approach with data collection through questionnaires. The research sample consists of 6th and 8th-semester students of the D4 Accounting program at Politeknik Negeri Pontianak. Data analysis uses multiple linear regression. The research findings indicate that discrimination and fairness do not have a significant impact on students' views regarding tax evasion, while the taxation system has a significant impact. In conclusion, students' perceptions of the ethics of tax evasion are influenced by their understanding of the taxation system, but not by their sense of fairness or discrimination. These findings are relevant to support more effective tax policies.

Keywords:

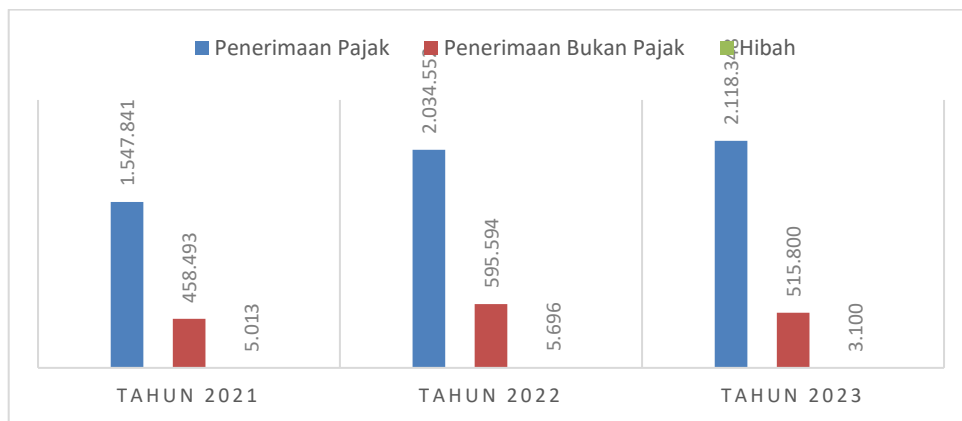
Tax Evasion; Fairness;
Taxation System; Student
Perception; Tax
Compliance

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat sejahtera dan makmur menjadi tujuan utama Indonesia, negara berkembang ini. Upaya mewujudkannya dilakukan melalui pembangunan berkelanjutan. Sumber pendapatan yang beragam, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, menjadi dasar pembiayaan pembangunan negara yang memerlukan dana yang relatif besar. UU

No. 6 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan "Pajak" sebagai iuran wajib pada Negara yang wajib dibayar oleh orang atau badan, yang diwajibkan oleh UU tanpa imbalan langsung, serta dipergunakan guna kepentingan Negara guna memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan SDA serta bagian pemerintah dari pendapatan BUMN (Rusdi, 2021). Hibah ialah dukungan tidak mengikat yang diberikan dalam bentuk dana moneter, produk, dan layanan dari badan pemerintah, organisasi masyarakat, dan bisnis lokal atau internasional (Putra et al., 2023). Pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak (seperti hasil pengelolaan SDA dan laba BUMN), serta hibah. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, dengan sasaran menaikkan kesejahteraan masyarakat. Berikut rincian realisasi penerimaan negara dari ketiga sumber tersebut pada tahun 2021-2023.



Gambar 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2021 sampai dengan 2023

Analisis data pada gambar menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan penyumbang utama pendapatan negara, dengan kontribusi yang jauh melebihi dua sektor lainnya. Tren peningkatan penerimaan pajak yang konsisten mendorong pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan upaya pencapaian target. Pemerintah menginisiasi sistem swasistem pelaporan pajak (*self assessment system*) sebagai salah satu upaya mendongkrak penerimaan pajak. Meskipun sistem self-assessment bertujuan menaikkan kesadaran wajib pajak, namun praktiknya, sistem ini seringkali dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak agresif (Pramudya et al., 2022). Di tengah gempuran program pemerintah, berbagai modus operandi marak dilaksanakan wajib pajak guna mengelak atau meminimalkan besaran pajak yang wajib mereka bayarkan.

Kasus PT Asian Agri Group (AAG) menjadi contoh nyata tax evasion yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Sebagai satu diantara perusahaan sawit raksasa, AAG terbukti menggelapkan PPN serta PPh hingga merugikan negara Rp 1,3 triliun. Mengingat kompleksitas tantangan perpajakan di masa depan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam perihal pandangan mahasiswa akuntansi pada penggelapan pajak. Mahasiswa akuntansi dianggap sebagai kelompok yang mempunyai pemahaman yang baik perihal sistem perpajakan, oleh karenanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dalam upaya menekan praktik penggelapan pajak.

Membangun masyarakat sejahtera di Indonesia memerlukan pengelolaan yang efektif atas sumber pendapatan utama negara, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Namun, tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan perpajakan adalah penghindaran pajak (tax evasion), yang telah terbukti menjadi hambatan utama dalam mencapai target penerimaan negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi individu terhadap penggelapan pajak, seperti keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pengetahuan perpajakan. Penelitian oleh (Latifah et al., 2024) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penghindaran pajak, sementara sistem perpajakan tidak memiliki efek signifikan. Penelitian lain menemukan bahwa diskriminasi perpajakan memiliki efek positif pada persepsi etika penghindaran pajak (Karlina, 2020). Mahasiswa akuntansi, sebagai calon pembayar pajak, menjadi subjek penting untuk memahami dinamika persepsi terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Latifah et al. (2024) menunjukkan bahwa teknologi informasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh signifikan dalam memperbaiki persepsi mahasiswa tentang keadilan perpajakan (Firmansyah et al., 2022). Selain itu, faktor lain seperti tingkat pengetahuan pajak juga ditemukan berkontribusi terhadap persepsi etika mahasiswa terhadap penghindaran pajak (Pratama, 2017). Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak yang rendah dapat memperburuk persepsi terhadap tindakan penggelapan pajak. Meskipun telah banyak penelitian tentang persepsi individu terhadap penghindaran pajak, gap penelitian yang signifikan adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana persepsi mahasiswa yang telah mendapatkan pendidikan perpajakan berkontribusi pada strategi pengurangan penghindaran pajak di masa depan. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi pandangan mahasiswa akuntansi sebagai aktor potensial dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada desain kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Dalam konteks penghindaran pajak, teori atribusi relevan untuk memahami bagaimana individu menyalahkan faktor eksternal seperti sistem perpajakan yang dianggap tidak adil. Penelitian oleh (N. K. T. J. Dewi & Merkusiwati, 2017) menemukan bahwa diskriminasi dalam sistem perpajakan berkontribusi pada persepsi negatif wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. (Latifah et al., 2024) mengungkap bahwa teknologi informasi dapat membantu mahasiswa memoderasi pandangan negatif terhadap sistem pajak dengan memperbaiki akses informasi perpajakan. Penelitian lain oleh (Pratama, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman rendah terhadap aturan perpajakan sering dikaitkan dengan atribusi eksternal terhadap kegagalan sistem.

Persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadilan dan pendidikan perpajakan. Penelitian oleh (Saragih & Putra, 2021) menunjukkan bahwa persepsi etis terhadap penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh nilai idealisme wajib pajak, yang menurunkan

toleransi terhadap penggelapan pajak. Studi lainnya oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) menemukan bahwa faktor gender dan religiusitas memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap etika penghindaran pajak. Selain itu, (Latifah et al., 2024) menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan pajak dapat diperbaiki melalui edukasi berbasis teknologi informasi.

Etis

Etika menjadi aspek penting dalam menilai penghindaran pajak. Studi oleh (Saputri & Keristin, 2021) menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sementara diskriminasi memperburuk persepsi tersebut. Penelitian (Pratama, 2017) menunjukkan bahwa tingkat Machiavellianisme memengaruhi persepsi etis mahasiswa terhadap penghindaran pajak, dengan tingkat tinggi cenderung mendukung tindakan tersebut. (Saragih & Putra, 2021) juga menemukan bahwa pendidikan dan idealisme mampu menurunkan toleransi terhadap penggelapan pajak dengan meningkatkan persepsi etis yang positif.

Mahasiswa Akuntansi

Mahasiswa akuntansi sering kali dianggap sebagai kelompok dengan pengetahuan lebih tentang sistem perpajakan, sehingga persepsi mereka terhadap penggelapan pajak menjadi penting untuk dipelajari. Penelitian oleh (Aji et al., 2021) menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi dengan tingkat pemahaman pajak yang baik cenderung memiliki persepsi negatif terhadap penggelapan pajak. Studi lain oleh (Latifah et al., 2024) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap keadilan pajak dan menurunkan toleransi terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh (Pratama, 2017) menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah, atribut kepribadian seperti Machiavellianisme turut memengaruhi persepsi mereka terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian oleh (Saragih & Putra, 2021) menunjukkan bahwa persepsi etis terhadap penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor idealisme dan relativisme, dengan idealisme cenderung mengurangi toleransi terhadap penggelapan pajak. (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018) juga menemukan bahwa diskriminasi dalam sistem perpajakan dapat memicu persepsi negatif terhadap pajak, sehingga meningkatkan risiko penggelapan pajak. Selain itu, penelitian (Latifah et al., 2024) menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk mengurangi potensi penggelapan pajak dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang dianggap tidak adil sering kali menjadi penyebab utama penghindaran pajak. Penelitian oleh (Lahengko, 2021) menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap etika

pajak. Studi oleh (Sucipto, 2024) juga mengungkapkan bahwa deteksi kecurangan dalam sistem perpajakan dapat mengurangi penggelapan pajak dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Selain itu, penelitian oleh (Fitria, 2017) menemukan bahwa pengetahuan yang rendah tentang aturan sistem pajak turut meningkatkan risiko mahasiswa mendukung penghindaran pajak.

Diskriminasi

Diskriminasi dalam sistem perpajakan sering kali menjadi pemicu persepsi negatif terhadap keadilan pajak. Penelitian oleh (N. K. T. J. Dewi & Merkusiwati, 2017) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berhubungan positif dengan toleransi terhadap penggelapan pajak, karena menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan wajib pajak. Studi oleh (Latifah et al., 2024) juga menemukan bahwa diskriminasi pajak dapat dimoderasi oleh penggunaan teknologi informasi yang mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keadilan sistem perpajakan. Selain itu, penelitian (Dewanta & Machmuddah, 2019) mengungkapkan bahwa diskriminasi sering kali dirasakan lebih besar oleh kelompok tertentu, seperti berdasarkan gender, yang memengaruhi persepsi etis mereka terhadap penggelapan pajak.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dengan responden mahasiswa semester 6 dan 8 program studi D4 Akuntansi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup terkait pandangan mahasiswa tentang etika penggelapan pajak (tax evasion). Jenis data yang dikumpulkan meliputi data kuantitatif (angka) dan data kualitatif yang dikonversi menjadi angka. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS. Pengujian instrumen meliputi uji validitas untuk menilai keabsahan kuesioner serta uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha ($\alpha > 0,6$ dianggap reliabel). Uji asumsi klasik, termasuk uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan statistik. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel dependen (persepsi tax evasion) dengan variabel independen (keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan religiusitas). Uji hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Proses penelitian melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penetapan objek hingga analisis data dan kesimpulan, guna memberikan gambaran representatif terkait sikap etis mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pada penelitian ini responden diklasifikasikan berlandaskan jenis kelamin serta program studi. Data karakteristik responden yang lebih lengkap bisa dilihat dari penjelasan tabel 2:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	32	29,93%
Perempuan	79	71,17%
Total	111	100%

Berlandaskan tabel 4.1, didapatkan total responden sebanyak 111 orang dengan total responden yaitu 32 orang atau 29,93% yang mempunyai jenis kelamin laki-laki, dan jumlah responden yaitu 79 orang atau 71,17 % responden perempuan.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

Semester	Jumlah	Persentase
6	68	62,27
8	43	38,73%
Total	111	100%

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh total responden sebanyak 111 orang dengan jumlah responden sebanyak 68 orang atau sebesar 62,27 % yang berasal dari program semester 6 prodi D4 Akuntansi, dan jumlah responden sebanyak 43 orang atau sebesar 38,73 % yang berasal dari semester 8 prodi D4 Akuntansi.

Pengujian Data

Dalam mengukur kuesioner yang digunakan sah atau tidak valid dengan melakukan uji validitas. Uji ini dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat diungkapkan valid bila jumlah dari $r_{hitung} > r_{tabel}$. Tetapi, bila diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan demikian butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner diungkapkan tidak valid. Untuk menemukan nilai r_{tabel} dengan memakai rumus ($df=n-2$)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R Tabel	Keterangan
Keadilan (X1)	X1.1	0,672	0,1865	VALID
	X1.2	0,805	0,1865	VALID
	X1.3	0,775	0,1865	VALID
Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0,827	0,1865	VALID
	X2.2	0,789	0,1865	VALID
	X2.3	0,565	0,1865	VALID
Diskriminasi (X3)	X3.1	0,901	0,1865	VALID
	X3.2	0,916	0,1865	VALID
	X3.4	0,871	0,1865	VALID
	X3.4	0,748	0,1865	VALID
Persepsi Etis (Y)	Y1.1	0,922	0,1865	VALID
	Y1.2	0,922	0,1865	VALID
	Y1.3	0,844	0,1865	VALID
	Y1.4	0,844	0,1865	VALID
	Y1.5	0,922	0,1865	VALID

Tabel tersebut menampilkan yaitu semua item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif yang melebihi r tabel. Perihal ini menunjukkan bahwa item dalam kuesioner tersebut sah dan dapat dilanjutkan ke penilaian data tambahan. Uji Reliabilitas dipakai guna memberi penilaian kuesioner yang mempunyai fungsi selaku indikasi variabel. Kuesioner dipandang bisa dipercaya jika respons individu pada pernyataan tetap konstan atau stabil sepanjang waktu. Dalam penilaian reliabilitas ini dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, instrumen dianggap dapat dipercaya bila mempunyai koefisien reliabilitas $> 0,6$. Capaian

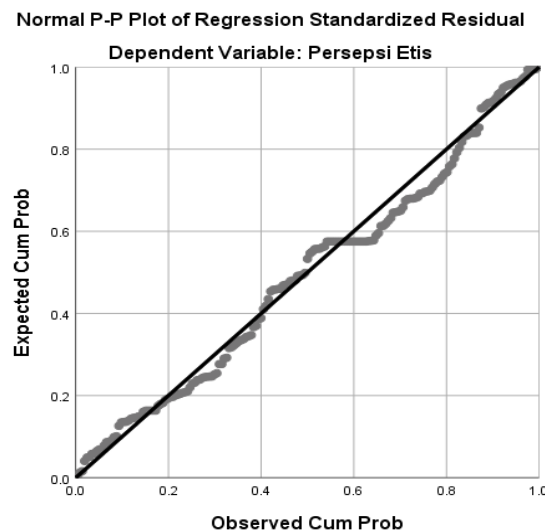
selanjutnya berkaitan dengan uji reliabilitas yang dilaksanakan pada penelitian ini:

Tabel 5. Uji Realibilitas

Variable	Cronbach's Alpha
Keadilan	.826
Sistem Perpajakan	.822
Diskriminasi	.917
Penggelapan pajak	.933

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai alpha Cronbach untuk semua variabel melebihi 0,60, dengan demikian mengonfirmasi bahwa instrumen kuesioner yang dipakai guna menilai variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan penghindaran pajak dapat diandalkan dan dapat dianggap selaku alat ukur yang valid untuk variabel-variabel tersebut. Uji asumsi klasik berperan penting dalam menilai distribusi normal data melalui uji normalitas, mengevaluasi multikolinearitas melalui nilai VIF dan Toleransi, memeriksa autokorelasi dengan Uji Run, dan menguji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer.

Uji normalitas memberi penilaian apakah data untuk variabel dependen serta independen dalam model regresi mematuhi sebaran normal. Penilaian normalitas menggunakan metode Normal P-Plot of Regression Standardized Residuals serta One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Temuan berikut ini berkaitan dengan metode grafis Normal P-Plot of the Regression Standardized Residual:



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Capaian uji normalitas, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik Normal P-Plot, menampilkan bahwa data terdistribusi secara teratur tanpa penyimpangan ke kanan atau kiri. Gambar di atas menggambarkan bahwa titik-titik data terdistribusi di sepanjang garis diagonal, dengan distribusinya sesuai dengan orientasi diagonal. Grafik menampilkan bahwa model regresi pada penelitian ini mencukupi asumsi normalitas, sebagaimana dibuktikan oleh pemeriksaan grafik plot probabilitas normal. Untuk mendukung temuan uji normalitas, penilaian selanjutnya menggunakan teknik Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil selanjutnya berkaitan dengan penilaian normalitas yang dilaksanakan oleh Uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 6. Hasil Uji One Sample Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1.25088109
Most Extreme Differences	Absolute	0.081
	Positive	0.081
	Negative	-0.074
Test Statistic		0.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,069 ^c

Uji Kolmogorov-Smirnov memberi capaian nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,069, yang melebihi level alpha yakni 0,05. Maka dari itu, bisa dilakukan pengambilan kesimpulan bahwa data tersebar secara normal, yang menunjukkan model regresi yang kuat. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada pemeriksaan nilai VIF dan Nilai Toleransi. Uji ini tidak memiliki indikator multikolinearitas bila nilai toleransi melebihi 0,10 serta nilai VIF < 10. Temuan selanjutnya dari penilaian Multikolinearitas ialah berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Variable	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Keadilan	0.597	1.674
Sistem Perpajakan	0.591	1.693
Diskriminasi	0.737	1.358

Capaian analisis Uji Multikolinearitas menampilkan bahwa keadilan mempunyai Collinearity Tolerance $0,597 > 0,10$ dan nilai VIF $1,674 < 10$, nilai Collinearity Tolerance *Sistem Perpajakan* $0,591 > 0,10$ serta nilai VIF $1,693 < 10$. Serta nilai Collinearity Tolerance *Diskriminasi* $0,737 > 0,10$ serta nilai VIF $1,358 < 10$ Sehingga nilai tolerance serta VIF diungkapkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas dari tiap-tiap variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengamati apakah timbul ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dan untuk meningkatkan uji ini yaitu dengan memakai Uji Glesjer dan hasilnya.

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.970	0.274		3.543	0.001
<i>Keadilan</i>	0.045	0.023	0.242	1.981	0.050

Sistem Perpajakan	-0.044	0.023	-0.232	-1.887	0.062
Diskriminasi	-0.003	0.018	-0.019	-0.177	0.860

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh yaitu nilai Sig dari seluruh variabel indepen pada penelitian ini menampilkan nilai Sig. > 0,05. Variabel independent yang dimaksud mencakup keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Perihal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak timbul heteroskedasitas persamaan model regresi.

Analisis ini dilakukan guna mengetahui adakah pengaruh variabel *Love of Money* serta *Machiavellian* pada pandangan etis mahasiswa akuntansi. Berikut capaian dari analisis regresi linier berganda :

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	22.301	0.419		53.207	0.000	22.301	0.419
Keadilan	0.060	0.035	0.188	1.712	0.090	0.060	0.035
Sistem Perpajakan	0.171	0.036	0.527	4.777	0.000	0.171	0.036
Diskriminasi	0.025	0.027	0.089	0.900	0.370	0.025	0.027

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Capaian regresi linier berganda diantara variabel *keadilan*, *sistem perpajakan*, *diskriminasi* pada penggelapan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persepsi Penggelapan pajak} = 22,301 + 0,060 X_1 + 0,171 X_2 + 0,025 X_3 + e$$

Dari persamaan yang telah dipaparkan, bisa diberi penjelasan bahwa :

1. Nilai konstanta dengan angka 22,301 yang berarti bahwa Ketika variabel independent diasumsikan tetap yaitu dengan nilai 0, nilai Persepsi penggelapan pajak adalah 22,301.
2. Koefisien kewajaran untuk variabel kewajaran adalah 0,060, dengan nilai p sebesar 0,090, yang >0,05, menampilkan bahwa variabel kewajaran tidak secara signifikan mempengaruhi etika penggelapan pajak. Penerapan pengenaan pajak yang adil dan tunggal akan meningkatkan pandangan tentang ketidak-etisannya penggelapan pajak sebesar 6,0%, bergantung pada asumsi sistem perpajakan dan diskriminasi.
3. Nilai koefisien guna variabel sistem perpajakan adalah 0,171, dengan tingkat signifikansi $0 < 0,05$, menunjukkan variabel sistem perpajakan secara signifikan mempengaruhi etika

penggelapan pajak. Penerapan sistem perpajakan yang efektif akan meningkatkan rasa ketidak-moralan penggelapan pajak sebesar 17%, bergantung pada prinsip-prinsip keadilan dan diskriminasi.

4. Koefisien diskriminasi guna variabel diskriminasi adalah 0,025, dengan nilai signifikansi $0,370 > 0,05$, menampilkan variabel diskriminasi tidak memberi dampak signifikan pada etika penggelapan pajak. Terjadinya satu tindakan diskriminasi dalam pajak akan meningkatkan rasa tidak etis penggelapan pajak sebesar 37,0%, dengan asumsi sistem perpajakan yang adil.

Uji-T dilaksanakan guna melakukan evaluasi dampak tiap-tiap variabel independen pada variabel dependen guna menguji hipotesis penelitian. Jika hipotesis diterima, signifikansinya kurang dari 0,1 dan thitung melebihi ttabel; sebaliknya, jika hipotesis ditolak, signifikansinya melebihi 0,1 dan thitung kurang dari t-tabel.

Tabel 9 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	53.207	0.000
	Keadilan	1.712	0.090
	Sistem Perpajakan	4.777	0.000
	Diskriminasi	0.900	0.370

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa:

1. Nilai p untuk kewajaran adalah 0,090. Karena nilai signifikansinya melebihi 5%, dengan demikian H0 dilakukan penerimaan, yang menunjukkan bahwa kewajaran tidak memberikan pengaruh dengan parsial pada persepsi mahasiswa program studi D4 Akuntansi tentang etika penggelapan pajak.
2. Nilai relevansi sistem perpajakan adalah nol. Karena nilai signifikansinya di bawah 5%, dengan demikian H0 dilakukan penolakan, yang menampilkan sistem perpajakan memberi dampak secara parsial pada persepsi mahasiswa prodi D4 Akuntansi tentang etika penggelapan pajak.
3. Nilai signifikansi untuk diskriminasi yaitu 0,370. Dikarenakan nilai signifikansinya melebihi 5%, dengan demikian H0 dilakukan penerimaan, yang menunjukkan diskriminasi tidak memberikan pengaruh dengan parsial pada persepsi mahasiswa prodi perpajakan tentang etika tax evasion.

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	17.678	0,000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi

Capaian uji F dalam penelitian ini menampilkan nilai F hitung yaitu 17,678 serta taraf Sig. yakni 0,176, yang menampilkan bahwa H₀ dilakukan penolakan serta H₁ dilakukan penerimaan pada $\alpha = 0,05$. Keempat faktor independen tersebut secara bersama-sama memengaruhi persepsi mahasiswa prodi perpajakan tentang etika tax evasion.

Pembahasan

Capaian uji hipotesis (H₁) menampilkan bahwa variabel keadilan tidak memberi dampak pada pandangan mahasiswa prodi perpajakan tentang etika penggelapan pajak. Nilai t hitung yaitu 0,060 dengan taraf Sig. 0,090 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak memberi dampak signifikan pada etika tax evasion. Maka dari itu, H₀ dilakukan penerimaan serta H₁ dilakukan penolakan. Uji ini secara statistik menunjukkan bahwa keadilan tidak memberikan dampak yang signifikan pada pandangan mahasiswa prodi perpajakan tentang etika tax evasion. Capaian penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Nauvalia et al., 2018) yang menunjukkan bahwa hipotesis tentang pengaruh keadilan pada persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak tidak terbukti (hipotesis dilakukan penolakan). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak tidak merasakan manfaat perpajakan, mereka tetap memenuhi kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Tingkat pengetahuan masyarakat cukup tinggi untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dalam segala situasi.

Capaian uji hipotesis (H₂) menampilkan bahwa variabel sistem perpajakan memberi dampak dengan parsial pada persepsi mahasiswa prodi D4 Akuntansi tentang etika penggelapan pajak. Hasil perhitungan menampilkan nilai t yaitu 4,777 dengan taraf signifikansi 0 yang ada < 0,05, oleh karenanya H₀ dilakukan penolakan serta H₁ dilakukan penerimaan. Secara statistik, uji ini menampilkan bahwa sistem perpajakan memberi dampak secara parsial pada persepsi mahasiswa prodi perpajakan perihal etika penggelapan pajak. Capaian penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Rahma et al., 2024). Sistem perpajakan memberi dampak positif pada opini wajib pajak perihal etika tax evasion. Penelitian (Averti & Suryaputri, 2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan memberi dampak pada opini tentang etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang dimengerti mahasiswa memberi dampak pandangan mereka tentang etika penggelapan pajak.

Capaian uji hipotesis (H₃) menunjukkan bahwa variabel diskriminasi tidak memberi dampak pada persepsi mahasiswa prodi perpajakan tentang etika penggelapan pajak. Nilai t hitung yaitu 0,900 dengan taraf Sig. 0,370 yang berada di atas 0,05, sehingga H₀ dilakukan penerimaan serta H₁ dilakukan penolakan. Uji ini secara statistik menunjukkan yaitu diskriminasi tidak memberi dampak dengan parsial pada persepsi mahasiswa prodi perpajakan tentang etika tax evasion. Capaian penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Ashari et al., 2020) yang mengungkapkan bahwa prasangka tidak memberi dampak pada penggelapan pajak. Namun capaian penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ferdiawan et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa prasangka memberi dampak pada penilaian wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Perihal ini menguatkan filosofi perpajakan yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa pajak merupakan kewajiban negara yang wajib dibayarkan oleh negara

berdasarkan undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Semua peraturan yang diterbitkan pemerintah perihal perpajakan mempunyai sifat wajib serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Semua pembatasan, terutama yang bersifat diskriminatif seperti zakat dalam Islam, yang berfungsi sebagai unsur pengurangan pajak, harus dipatuhi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks pemahaman dan pengelolaan sistem perpajakan di kalangan mahasiswa. Temuan bahwa variabel keadilan tidak memengaruhi persepsi mahasiswa tentang etika penggelapan pajak menunjukkan adanya kecenderungan bahwa aspek moralitas tidak selalu didasari oleh rasa keadilan dalam konteks perpajakan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa wajib pajak cenderung tetap memenuhi kewajibannya, meskipun keadilan dalam sistem perpajakan dirasakan belum benar-benar optimal. Namun, temuan ini memberikan indikasi bahwa kebijakan pajak yang mengedepankan keadilan perlu terus disosialisasikan guna meningkatkan kesadaran etis di masyarakat. Di sisi lain, pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa sistem yang jelas, transparan, dan dapat dipahami memainkan peran besar dalam membentuk paradigma etis terkait penggelapan pajak. Hal ini menguatkan pentingnya pengembangan sistem perpajakan yang efektif dan edukasi perpajakan yang lebih masif, khususnya bagi generasi muda. Temuan ini juga menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang mendukung kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang hanya mengambil responden dari satu institusi, yaitu Politeknik Negeri Pontianak, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selain itu, penyusunan kuesioner tertutup dapat membatasi eksplorasi lebih dalam terhadap sudut pandang mahasiswa terkait topik ini. Penelitian ini juga belum menggali faktor lain di luar keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi, yang mungkin memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak.

Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan agar cakupan penelitian diperluas dengan melibatkan responden dari berbagai institusi dan latar belakang pendidikan, sehingga hasilnya lebih representatif secara nasional. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi mahasiswa dalam konteks budaya dan pengalaman pribadi terkait pajak. Penambahan variabel lain, seperti tingkat pendidikan perpajakan yang diterima mahasiswa atau nilai-nilai moral individu, juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pembentukan sikap etis terkait penggelapan pajak. Selain itu, pengujian terhadap efektivitas sosialisasi pajak dan kebijakan perpajakan dalam membentuk kesadaran masyarakat dapat menjadi ruang eksplorasi lebih lanjut untuk mendukung reformasi perpajakan di Indonesia.

REFERENSI

Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 101–113.

- Ashari, F. R., Kara, M., & Bulutoding, L. (2020). Pengaruh Money Ethics dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion dengan Keimanan sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 14–28.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. ISSN, 2302–8556.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*, 22(2), 1626–1655.
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90–104.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan PAjak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Latifah, J., Yeni, F., & Sari, P. I. P. (2024). Determinan Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 1–14.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2).
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam hukum pajak. *Jurnal sosial dan sains*, 2(2), 361–374.
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, tax knowledge, and ethical perceptions of tax avoidance: survey of undergraduate students in West Java, Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(1), 83–90.
- Putra, A., Veronica, D., & Bansa, Y. A. (2023). Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pengaruh Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(1), 29–37.
- Rahma, A. A., Nurlaela, R. S., Meilani, A., Saryono, Z. P., & Pajrin, A. D. (2024). Ikan Sebagai

- Sumber Protein dan Gizi Berkualitas Tinggi Bagi Kesehatan Tubuh Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3132–3142.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 105–120.
- Saragih, A. H., & Putra, I. D. N. S. (2021). Ethical perception of tax evasion: Determinants and consequences on voluntary tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 1–14.
- Sucipto, A. (2024). Analysis of the Tax System, Fairness and the Possibility of Fraud Detection on Perceptions of Tax Evasion. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(2), 65–72.